

## **BAB II**

### **KETERKAITAN INDONESIA DENGAN IMF**

Bab ini membahas tentang politik ekonomi Indonesia internasional, dinamika keterlibatan Indonesia di IMF, menguatnya peran Indonesia di IMF.

#### **A. Politik Ekonomi Indonesia Internasional**

##### **1. Politik Ekonomi Indonesia**

Pengujian model-model pertumbuhan ekonomi didasarkan pemilihan negaranya sendiri didasarkan pada gagasan bahwa proses pembangunan ekonomi yang berlangsung. Biasanya diprediksi secara cukup pasti bahwa penyerapan tenaga kerja oleh sector pertanian berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak kalah penting dari penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri terutama di negara berkembang, benar tidaknya pendapat yang mengatakan bahwa penurunan penyerapan tenaga kerja di sector pertanian merupakan atas proses pembangunan negara maju.

Tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung sering berubah dalam system ekonomi, transformasi struktur sosial dan ternyata juga berkaitan dengan system politik. Namun fakta bahwa pertumbuhan ekonomi bervariasi seiring dengan beberapa variable lainnya. Dalam rangka mengevaluasi tingkat keberhasilan atau prestasi kinerja dari masing-masing system ekonomipolitik.

Ekspor non migas Indonesia misalnya berbeda dengan ekspor migas, sebenarnya lebih bersifat supply daripada demand. Artinya, membatasi pertumbuhan ekspor untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi justru kelemahan-kelemahan yang bersumber pada

kemampuan produksi di Indonesia sendiri dan bukan pasar. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didukung oleh sektor industri yang selalu tumbuh di atas, fakta ini tentu mengesankan bagi suatu negara yang ingin menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Konsisten laju pertumbuhan sektor industri akan tercapai apabila efisien terus ditingkatkan, ekonomi biaya tinggi dapat ditekan serendah mungkin dan dilaksanakan transformasi teknologi serta investasi tanpa kapasitas menganggur.

Perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk, berlaku hukum engel, meminjam istilah Kuznets transformasi struktural dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekuilibrium umum, ciri dan pengaturan waktu dari proses industrialisasi dipengaruhi oleh perubahan permintaan domestik, pergeseran keunggulan komparatif, pertumbuhan produktivitas sektoral dan akumulasi barang modal.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan adanya potensi untuk memasuki tahap negara industri. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbang oleh sektor pertanian, tapi tergeser oleh sektor industri. Ekonomi Politik menurut Ilchman-Uphoff adalah “an integrated social science of public choice” juga ekonomi politik merupakan keseluruhan semua usaha-usaha, perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mengatur, mempengaruhi atau langsung menetapkan jalannya kejadian-kejadian

kehidupan ekonomi secara langsung dengan satu atau banyak cara. Bahwasanya ekonomi politik pada negara-negara yang baru berkembang dan politik ekonomi yang dijalankan pada negara-negara yang ekonomis maju agak berbeda, hal ini tergantung daripada sasaran-sasaran yang diberikan prioritas. Begitu pula tidak pernah ada kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negeri, dalam negeri, ataupun usaha-usaha pengembang hukum yang lepas dari persoalan pembiayaan dalam bentuk apapun ada hubungannya dengan cara manusia berekonomi juga dengan adanya tindakan-tindakan terutama demi peraturan atau demi pengaruh dari kejadian-kejadian ekonomi dalam negeri, luar negeri atau tambahan pengaruh politik kebudayaan atau aspek-aspek hukum yang harus betul-betul diperhatikan. Bahwasanya ekonomi politik dapat ditunjukkan kearah : Pertama, memperbaiki keadaan moneter suatu negara, Kedua, Mengusahakan untuk memperbanyak investasi di dalam negeri. Ketiga, mematahkan posisi-posisi monopoli pihak swasta yang merugikan. Kelima, mengusahakan agar “diperbaiki” neraca pembayaran yang memburuk dan sebagainya. dikarenakan didalam politik dibahas penerapan kekuasaan atau wewenang dan persaingan untuk memperolehnya dalam suatu komunitas. Dan ekonomi membahas alokasi dan pertukaran sumber daya ekonomi maupun politik yang langka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>detik. (2017, april 23). *berita ekonomi bisnis*. Retrieved november 5, 2017, from sri mulyani beberkan hasil pertemuan imf world bank: <http://finance.detik.com>

## 2. Ekonomi Politik Internasional Indonesia

Indonesia bukan hanya anggota pengutang dari Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF), melainkan kedua lembaga tersebut juga merupakan bagian dari Indonesia sendiri. Ini berkaitan dengan kemampuan Indonesia yang ia anggap mampu memberikan pinjaman sebesar 1 miliar dollar AS ke IMF guna membantu krisis di Eropa dan Amerika. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan RI Mahendra Siregar pada diskusi umum bersama jajaran pejabat Bank Dunia di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis. "Ketika berbicara dengan IMF dan Borld Bank, kita tidak hanya berbicara sebagai member-nya IMF maupun World Bank, melainkan mereka adalah bagian dari kita juga. Kalau kamu (IMF dan World Bank) perlu uang, kita akan memberikannya kepada World Bank dan IMF. Kita bukan lagi Indonesia yang sama pada 10 tahun silam," kata Mahendra Siregar, Kamis (12/7/2012). Dirinya optimistis, kini Indonesia sudah mampu mengemban berbagai tanggung jawab baru dalam urusan ekonomi internasional. "Mengimplikasikan juga bahwa peran baru Indonesia akan terus menguat. Ini adalah situasi yang harus kita tanamkan. Harus kita lihat sebagai model ketika mengantisipasi World Trade scenario," tutur Mahendra. Ia pun juga mengatakan, urusan pendanaan dalam negeri sendiri, pemerintah pun turut memperhatikannya. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur daerah. "Dalam APBN 2012, kita juga sudah menyiapkan dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur. Pada revisi April 2012, kami telah menaikkannya dengan Rp 4 triliun untuk mendukung infrastruktur di wilayah Indonesia timur," tuturnya.

## B. Dinamika Keterlibatan Indonesia di IMF

### 1. Keterlibatan Indonesia di IMF

Tabel 1.1 Indonesia dengan IMF

<b>Independent Variable (Struktur Internasional)</b>	<b>Intervening Variables (Situasi Internal)</b>	<b>Dependent Variable (Pilihan Dasar Luar)</b>
Distribusi sistem kuasa dan struktur Internasional	Kepentingan rezim, situasi ekonomi dan politik domestic	Keterlibatan dan perkembangan peran Indonesia didalam IMF

Ketika suatu negara mengadakan pembicaraan dengan IMF tentang pembiayaan, mungkin negara itu berada dalam keadaan krisis ekonomi atau mendekati krisis dengan mata uangnya diserang pasar valuta asing dan cadangan internasionalnya. Yang kosong, kegiatan ekonomi berhenti atau jatuh dan tingkat kebangkrutan meningkat. Untuk mengembalikan posisi pembayaran eksternal negara tersebut menjadi sehat agar dapat memulihkan kembali kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dibutuhkan suatu kombinasi penyesuaian ekonomi dan pembiayaan swasta atau resmi. IMF memberikan pemerintah negara nasihat tentang kebijakan ekonomi yang bisa diharapkan mengatasi masalah dengan sangat efektif. Karena IMF juga menyediakan pembiayaan, IMF harus setuju dengan pemerintah negara tentang suatu program kebijakan yang bertujuan memenuhi tujuan khusus dan diperhitungkan yang berkaitan dengan viabilitas eksternal, kestabilan keuangan moneter dan pertumbuhan berkelanjutan. Perincian

tentang program tersebut dijabarkan dalam sebuah “surat” (letter of intent) dari pemerintah kepada Direktur Pengelola IMF. Suatu program yang didukung oleh pembiayaan IMF dirancang oleh pemerintah nasional dengan kerjasama yang erat dengan staff IMF dan disesuaikan dengan kebutuhan keadaan khusus negara tersebut.<sup>2</sup>

## **2. Perekonomian Global**

Perekonomian Global masih menghadapi sejumlah risiko yang telah mengemuka. Tiga risiko utama kembali terlihat, yakni pertumbuhan ekonomi yang menurun, harga komoditas yang masih rendah dan ketidakpastian di pasar keuangan yang masih tinggi. Permasalahan menjadi semakin kompleks akibat ketidakpastian geopolitik di beberapa negara. Berbagai perkembangan yang kemudian berimbas pada proses pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global masih belum kuat dan tidak merata. Pertumbuhan ekonomi duniatercatat sebesar 3,1%, sedikit lebih rendah dari capaian sebesar 3,2%. Perkembangan tersebut juga lebih rendah dari perkiraan awal tahun sebesar 3,4%. Berdasarkan kelompok negara, pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat terutama dipengaruhi ekonomi negara maju yang masih lemah yang bertumbuh 1,6%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 2,1%. Kinerja negara maju yang lemah dipengaruhi oleh

---

<sup>2</sup>publik, j. (2017). forum internasional. *pengembangan ekonomi dan kebijakan publik*, 1-3.

penurunan pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang sedikit meningkat dari 4,0% menjadi 4,1%. Perkembangan positif di negara berkembang terutama ditopang beberapa negara di Asia seperti India dan Indonesia yang mencatat kenaikan pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun dari 6,9% menjadi 6,7%. Beberapa faktor memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat. Di AS, pertumbuhan ekonomi yang menurun disebabkan oleh investasi residensial dan investasi nonresidensial yang masih lemah akibat kinerja sektor minyak dan pertambangan yang masih turun. Di Eropa, investasi juga melambat terutama pascareferendum Brexit pada akhir Juni 2016 yang kemudian memicu ketidakpastian dan menahan minat pemilik modal untuk berinvestasi. Di Jepang, pelemahan ekonomi dipengaruhi penurunan di hampir seluruh komponen PDB yakni konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, pelemahan ekonomi Tiongkok banyak dipengaruhi oleh strategi economic re-balancing yang ditempuh Pemerintah Tiongkok dalam merespons perekonomian global yang belum kuat. Dampak pengaruh pertumbuhan ekonomi dunia yang belum solid melebar karena banyak negara merespons pelemahan ekonomi dunia dengan strategi pertumbuhan ekonomi berorientasi domestik. Strategi tersebut membuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dunia dan volume perdagangan dunia melemah. Hubungan keduanya semakin turun karena saat bersamaan global value chain juga terindikasi berkurang. Akibatnya, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap volume perdagangan dunia menurun dari 0,6 menjadi hanya 0,3. Perkembangan tersebut pada gilirannya semakin

menekan kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi banyak negara. Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat berdampak kepada harga komoditas global yang masih rendah sampai dengan triwulan III. Dari komoditas energi, rata-rata harga minyak dunia sampai dengan triwulan III masih dalam kisaran 28,7 dolar AS hingga 41,3 dolar AS per barel, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata harga minyak sebesar 48,7 dolar AS per barel. Satu sisi, perkembangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh permintaan yang belum kuat sejalan dengan perekonomian dunia yang masih lemah.

Di sisi lain, harga minyak dunia yang rendah juga dipengaruhi peningkatan pasokan minyak di pasar dunia akibat respons OPEC yang meningkatkan produksi. Harga minyak dunia baru meningkat pada triwulan IV hingga rata-rata mencapai 46,5 dolar AS per barel. Harga minyak dunia naik cukup tinggi pada triwulan IV dipengaruhi oleh permintaan dari negara berkembang, seperti Tiongkok dan India yang mulai meningkat. Selain itu, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh produksi minyak dunia yang berkurang terutama pascakomitmen penurunan produksi oleh OPEC. Sejalan dengan kondisi tersebut, harga komoditas nonmigas global, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia seperti batubara, kelapa sawit, dan tembaga, juga masih rendah sampai dengan awal triwulan III. Perkembangan harga komoditas yang rendah terutama dipengaruhi oleh permintaan dunia yang belum kuat. Selanjutnya, perkembangan harga komoditas nonmigas menunjukkan peningkatan tajam pada triwulan IV. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh permintaan yang mulai meningkat, terutama dari Tiongkok, serta gangguan produksi di komoditas timah dan kelapa sawit.



Harga komoditas yang masih rendah dan permintaan dunia yang belum kuat berkontribusi kepada inflasi dunia yang masih rendah. Sampai dengan triwulan III inflasi dunia tercatat sangat rendah di beberapa negara dipengaruhi harga energi yang masih rendah dan permintaan agregat yang belum kuat seperti di Jepang dan Eropa. Namun, sejak triwulan IV inflasi dunia mulai meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas dan permintaan agregat dunia yang mulai naik. Dengan dinamika tersebut, inflasi dunia mencapai 3,2%, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan inflasi sebesar 2,9%. Peningkatan inflasi tercatat lebih besar terjadi di negara maju dibandingkan dengan inflasi di negara berkembang. Inflasi negara maju naik dari 0,5% menjadi 1,2%, sedangkan inflasi negara berkembang stabil sebesar 4,7%. Perekonomian dunia yang belum solid mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global terindikasi dari indeks VIX yang naik, terutama pada triwulan I dan triwulan IV. Ketidakpastian di pasar keuangan global juga meningkat dipengaruhi rencana kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS.

Ketidakpastian kemudian memicu perubahan pola aliran modal di pasar keuangan global. Hal ini kemudian mendorong penguatan dolar dan memberikan tekanan kepada mata uang banyak negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut tergambar dari rata-rata indeks DXY yang meningkat pada triwulan I dan triwulan IV sejalan dengan penguatan dolar AS. Ketidakpastian pasar keuangan dunia yang tinggi juga didorong transisi politik di beberapa negara utama dunia. Pada akhir semester I, hasil referendum Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit), sempat memicu ketidakpastian karena berbeda

dengan ekspektasi pelaku pasar. Ketidakpastian kembali naik saat pasar menyikapi hasil pemilihan presiden AS. Pelaku pasar membaca berbagai rencana arah kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump rentan mengganggu proses pemulihan ekonomi global. Rencana arah kebijakan AS tersebut antara lain kebijakan fiskal yang lebih ekspansif di tengah beban utang pemerintah yang besar, rencana kebijakan perdagangan internasional yang lebih protektif dan beberapa kebijakan di bidang imigrasi. Kebijakan makroekonomi yang ekspansif dan ditopang dengan penguatan kebijakan struktural ditempuh banyak negara dalam merespons dinamika perekonomian dunia 2016. Berbagai bank sentral negara maju menempuh kebijakan moneter ekspansif, kecuali AS yang menaikkan suku bunga FFR sebanyak satu kali. Bank of Japan menempuh kebijakan suku bunga negatif, sama seperti Bank Sentral Eropa yang juga menempuh pelonggaran kebijakan moneter.

Bank Sentral Tiongkok juga melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan Giro Wajib Minimum guna menjaga likuiditas yang berkurang saat terjadi pembalikan modal. Pemerintah Tiongkok juga menempuh kebijakan reformasi struktural seperti di sektor produksi yang membatasi peningkatan kapasitas produksi untuk industri baja, batubara dan aluminium. Sementara di India, bank sentral juga menurunkan suku bunga kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan reformasi struktural Pemerintah untuk memperkuat kemudahan berinvestasi.

Kebijakan makroekonomi di banyak negara juga didukung berbagai kerja sama internasional. Agenda utama kerjasama internasional adalah mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dunia serta meningkatkan resiliensi ekonomi dan sistem keuangan global. Beberapa kerja sama tersebut, seperti yang

dilakukan forum G20 dan EMEAP. Bank Dunia seperti halnya International Monetary Fund (IMF) juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui berbagai inisiatif investasi infrastruktur dalam forum G20. Untuk kawasan regional, penguatan resiliensi kawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas surveilans ASEAN Macroeconomic Research Office (AMRO).

Masalah perdagangan internasional paling serius yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya proteksionisme di berbagai Negara maju (developed countries) serta kecenderungan negara-negara di dunia untuk membentuk tiga blok perdagangan utama. Masalah moneter internasional paling serius adalah ketidakstabilan kurs valuta asing yang terus berlanjut (yaitu fluktuasi yang sangat besar dari nilai mata uang-mata uang internasional), serta besarnya dan menetapnya misalignment (yaitu fakta bahwa kurs dapat berada jauh di luar keseimbangan untuk jangka waktu lama). Masalah ekonomi internasional lainnya yang dianggap serius adalah munculnya tingkat pengangguran structural yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu lama di negara-negara Eropa, masalah restrukturisasi yang dihadapi Negara-negara Eropa Timur dan bekas Negara-negara Uni Soviet, serta tingginya kemiskinan yang melebarnya jurang ketidakadilan (inequalities) yang dihadapi Negara-negara paling miskin di dunia.

### **C. Menguatnya Peran Indonesia di IMF**

Sri Mulyani memaparkan masalah ekonomi saat ini, Sri Mulyani akan memimpin sidang para Dewan Gubernur yang mewakili 189 negara anggota World Bank untuk membuat berbagai keputusan penting mengenai masa

depan World Bank Group (WBG) yaitu arah reformasi WBG untuk membantu negara-negara berpendapatan rendah dan berkembang untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goal 2030. Di samping itu, keputusan penting lainnya adalah untuk menentukan focus dan prioritas WBG, yaitu membantu meningkatkan sumberdaya domestik untuk membangun infrastruktur dan sumberdaya manusia, meningkatkan peran sektor swasta, kecukupan modal WBG sertabisnis model WBG terutama dalam peningkatan efisiensi dan operasi WBG.<sup>3</sup>

Dalam kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian serta terjadinya konflik di berbagai wilayah dan harga komoditas yang masih lemah, tantangan negara berkembang dan negara berpendapatan rendah menjadi makin besar, terutama dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan komitmen negara-negara G20 terhadap kerjasama global dan perdagangan dunia. Hal ini berkaitan dengan perubahan pandangan pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan global dan kerjasama multilateral.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam "High Level Symposium on Global Economic Governance in a Multipolar World" yang merupakan rangkaian pertemuan G20 di Baden-Baden Jerman. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral

---

<sup>3</sup>Indonesia, c. (2017, maret 20). *ekonomi*. Retrieved november 5, 2017, from sri mulyani ingatkan komitmen negara g20: <http://www.cnnindonesia.com>

negara-negara anggota G20. Sri Mulyani mengingatkan semangat kerjasama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karenanya, G20 harus mampu menjaga komitmennya agar tidak mengancam kredibilitas kerjasama G20 sendiri dan menghindari kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu negara dan berakibat buruk bagi negara lain. Menurut Sri Mulyani, tatanan dunia yang adil dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan nilai dasar yang ditanamkan oleh pendiri Bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dalam pertemuan dan pergaulan internasional.

Pandangan ini kemudian disambut para Menteri Keuangan negara-negara G20 yang memberikan dukungan mengenai perlunya penegasan komitmen ini dilakukan. Kemudian para Menteri Keuangan sepakat untuk memasukkan pernyataan mengenai perdagangan dunia. Sebagai catatan, perubahan pandangan AS terhadap perdagangan global dan kerja sama multilateral mulai terlihat. Di Mata Internasional Meski dianggap belum memuaskan di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia justru diapresiasi oleh dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5 persen dianggap cukup baik di tengah gejolak pasar keuangan global dan anjloknya harga komoditas. Dalam kurun waktu 3 tahun, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bahkan bisa menyakinkan 3 lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Hal tersebut merupakan yang pertama setelah 20 tahun silam. Tiga lembaga pemeringkat utama dunia yang memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia yaitu Fitch Ratings dan Moody's, dan Standard and Poor's (S&P).

Pemerintah menilai capaian peringkat layak investasi luar biasa karena selama 19 tahun skala ekonomi Indonesia naik 3 kali lipat dan banyak perkembangan pesat. Namun segala capaian itu tidak pernah dianggap cukup bagi tiga pemeringkat internasional tersebut memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Barulah pada tahun ini, ketiga lembaga pemeringkat yang disegani ini mengakui reputasi ekonomi Indonesia. Capaian layak investasi patut dibanggakan karena S&P yang justru menurunkan peringkat investasi AS pada 5 tahun lalu sementara itu Moody's menurunkan peringkat investasi China tahun ini. Selain itu, kemudahan berinvestasi atau ease of doing business di mata Bank Dunia juga meroket tajam. Pada 2017 ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi 91, naik 15 peringkat dari posisi di tahun sebelumnya, yakni 106. Tidak hanya itu, Indonesia bahkan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan pimpinan International Monetary Fund–World Bank 2018 di Bali. Acara tersebut merupakan acara besar yang akan dihadiri oleh seluruh menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia.

Diperkirakan, akan ada 15.000 orang delegasi dari seluruh dunia yang akan hadir di Pulau Dewata pada tahun depan. "Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan dunia atas reputasi dan stabilitas ekonomi, politik, keamanan serta kemajuan pembangunan Indonesia yang saat ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski begitu, pemerintahan Jokowi masih memiliki segudang pekerjaan rumah di bidang ekonomi mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga mempersempit jarak kesenjangan ekonomi. Dalam dua tahun ke depan, pekerjaan rumah itu harus maksimal dituntaskan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di sela-sela pertemuan tahunan IMF-World Bank 2017 menyatakan kondisi ekonomi Indonesia yang sudah

mengalami perubahan jauh ke arah yang lebih baik saat ini mengutip wawancara Sri Mulyani atau yang akrab disapa Ani dengan *CNBC*, Jumat 13 Oktober 2017, dia mengatakan perbaikan ekonomi Indonesia tidak lepas dari bagaimana cara pemerintah dan pemangku kebijakan mencoba untuk membangun fundamental dan fondasi yang lebih kuat dari berbagai guncangan.

"Perekonomian Indonesia sekarang jauh lebih tangguh dan ini ada kaitannya dengan fondasi yang lebih kuat dari cara kita mengelola ekonomi," kata Ani dalam wawancara tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini relatif stabil dan berada pada level 5,6 persen pada dekade ini. Angka itu dihasilkan dari kontribusi yang seimbang antara faktor domestik seperti konsumsi, pertumbuhan investasi yang kuat, kendati dihadapkan dengan banyak kejutan seperti penurunan harga komoditas. Di sisi lain, dia menjelaskan saat ini pemerintah sudah tak dihantui oleh subsidi BBM, sebab saat ini alokasinya jauh lebih rendah sejak Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut subsidi premium di 2015.

Hal itu membuat ruang fiskal Indonesia tak dihadapi pada defisit yang disebabkan oleh kegiatan tak produktif."Sebenarnya presiden melakukan keputusan yang sangat bagus kembali di 2015, saat menggeser subsidi, subsidi BBM ke dalam pembangunan infrastruktur.Jadi kebijakan fiskal yang kredibel lebih baik dalam hal pendapatan," tutur Ani.Selain itu, neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan turun di bawah dua persen.Indonesia juga memiliki investasi asing langsung (FDI) yang sangat kuat yang menurut dirinya penting.Dari pengaruh global, Ani menambahkan perilaku pasar keuangan jauh lebih rasional.Hal ini ditunjukkan dari penurunan tingkat bunga acuan (BI 7 days repo rate) di tengah ancaman kenaikan tingkat bunga AS.Jadi bahkan

ketika tingkat suku bunga meningkat di Amerika Serikat, kami sebenarnya menurunkan tingkat suku bunga kurs repo Bank Indonesia," jelas dia.